

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*
- Direktur Jenderal Pajak. 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2015, tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Badan Penerbitan Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Sakti, Nufransa Wira. (2019, 20 Februari). *Pendapatan Negara Dari Perpajakan Terus Tumbuh Menopang Pertumbuhan Ekonomi 2019*. Diakses Pada 16 Maret 2020, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-pendapatan-negara-dari-perpajakan-terus-tumbuh-menopang-pertumbuhan-ekonomi-2019/>
- Setiawan, Hendy. (2013, 28 Juli). *Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed Sebagai Alternatif Berbagi Beban*. Diakses Pada 18 Maret 2020, dari <https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=52>
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat